

# IMPLEMENTASI PELAYANAN SOSIAL FAKIR MISKIN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER

Ityan Habibi 1610511010<sup>1</sup> Akbar Maulana S.IP., M.Si. 1987070912003923<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Email: [habibyityn07@gmail.com](mailto:habibyityn07@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pelayanan Sosial Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember sudah terlaksana dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan data deskriptif. Objek pada penelitian ini adalah kepala bidang penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia, fakir miskin, korban bencana dan kepala Seksi serta staf pelayanan dan rehabilitasi sosial fakir miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dan responden pada penelitian ini adalah mereka yang paham atas masalah yang sedang diteliti. Sedangkan narasumber juga mempunyai pandangan cukup untuk menjelaskan masalah yang diteliti. Kesimpulan penelitian ini mendeskripsikan seperti apa implementasi pelayanan sosial fakir miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember.

**Kata Kunci :** Implementasi, Pelayanan Sosial, Fakir Miskin

## ABSTRACT

*This study aims to determine how the implementation of social services for the poor at the Social Service of Jember Regency has been carried out well. This study uses a qualitative approach with descriptive data. The object of this research is the head of social welfare problems for the elderly, the poor, disaster victims and the head of the section and social service and rehabilitation staff for the poor at the Social Service of Jember Regency. Collecting data through interviews, observation and documentation. Informants and respondents in this study are those who understand the problem being researched. Meanwhile, the resource persons also have sufficient views to explain the problem under study. The conclusion of this study describes what the implementation of social services for the poor is like which is carried out by the Social Service of Jember Regency.*

**Keywords :** Implementation, Social Service, The poor

## I. PENDAHULUAN

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan tingkat kemiskinan dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 penduduk miskin berjumlah 265.100 penduduk, pada tahun 2017 penduduk miskin berjumlah 266.900 penduduk, dan pada tahun selanjutnya yaitu 2018 penduduk miskin berjumlah 243.420 penduduk. Jadi dalam kurun waktu 3 tahun tersebut yaitu pada tahun 2016, 2017, hingga 2018 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember mengalami kenaikan dan penurunan meskipun tidak secara signifikan, hal tersebut salah satu parameter kesuksesan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan beragram program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jember, baik melalui domain yang secara langsung menyentuh pada para penerima manfaat maupun melalui domain pembangunan infrastruktur di daerah. Namun meskipun ada penurunan akan tetapi jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya Jember masih berada pada urutan ke-22 kabupaten/kota sangat miskin dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur di tahun 2018. Hal tersebut membuktikan bahwa angka kemiskinan di Jember masih cukup tinggi.

Dinas Sosial Kabupaten Jember sebagai kepanjangan dari pemerintah di daerah telah melakukan atau melaksanakan pendataan fakir miskin untuk diberikan berbagai program pengentasan kemiskinan. Akan tetapi data yang ada mencapai angka yang cukup tinggi. Padahal pendataan

tersebut tidak hanya dilakukan oleh dinas sosial saja, akan tetapi dibantu oleh beberapa instansi lain yang terkait dengan pengentasan kemiskinan. Namun yang terjadi di lapangan masyarakat miskin di Kabupaten Jember jumlahnya terus meningkat dan bahkan terus bertambah dari tahun ke tahun. Data yang valid merupakan pondasi dasar dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah pada program selanjutnya. Oleh karena itu, menurut peneliti data adalah hal yang paling pokok dalam menjalankan program pelayanan dan rehabilitasi sosial fakir miskin. Berikut adalah jumlah data fakir miskin yang ada di Kabupaten Jember dari instansi Dinas Sosial :

Tabel Jumlah fakir miskin Jember tahun 2016-2018

No.	Tahun	Jumlah
1.	2016	693.371 (Jiwa)
2.	2017	65.993 (KK)
3.	2018	693.451 (Jiwa)

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Jember

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa data yang diperoleh ternyata dari tahun ke tahun mengalami penurunan, adapun angka tersebut menurun tapi hanya sedikit dan tidak signifikan, sedangkan pada tahun 2019 s/d 2020 pihak pemerintah daerah dalam hal ini dinas sosial tidak melakukan pendataan terhadap fakir miskin di wilayahnya. Hal ini menyebabkan warga miskin yang ada di jember tidak diketahui keberadaan maupun jumlahnya sehingga hal ini menjadi kajian dasar bagi peneliti untuk memberikan pemahaman dan solusi

dengan berlandaskan teori yang ada. Sedangkan, menurut data yang berhasil dihimpun oleh peneliti, program dan kegiatan yang dijalankan oleh pihak pemerintah dalam hal ini dinas sosial hanya sebatas pemberian bantuan sembako dan sarana prasana. Program dan kegiatan tersebut juga dianggarkan dengan angka yang cukup besar, akan tetapi meskipun program telah dijalankan masih saja terdapat fakir miskin di Kabupaten Jember. Dengan demikian, sangat diperlukan tindakan yang komperhensif dari pemerintah Kabupaten Jember untuk menangani permasalahan fakir miskin dengan melalui program maupun pelayanan sosial bagi fakir miskin.

#### **Rumusan Masalah**

Bagaimanakah Implementasi Pelayanan Sosial Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember?

#### **Tujuan Penelitian**

Mengetahui bagaimana proses dalam Implementasi Pelayanan Sosial Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember.

#### **Manfaat Penelitian**

1. Hasil dari riset ini dapat menambah pemahaman dan wawasan tambahan bagi kalangan akademisi pada bidang ilmu pemerintahan yaitu mengenai Implementasi Pelayanan Sosial Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Jember dalam melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan sosial khususnya dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Jember.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode dari riset ini adalah salah satu langkah sistematis dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang hendak diteliti.

#### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan data kualitatif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan keadaan atau fenomena sosial tertentu.

Pada penelitian ini membahas mengenai Implementasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember.

#### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### *A. Lokasi Penelitian*

Lokasi penelitian diambil di Dinas Sosial Kabupaten Jember. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah Dinas Sosial yang memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial fakir miskin di kabupaten jember.

Nama Instansi: Dinas Sosial Kabupaten Jember

Alamat : Jl. PB Sudirman No.38, Kp. Using, Jemberlor, Kec Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118.

##### *B. Waktu Penelitian*

Waktu penelitian dilakukan sekitar satu bulan, dari tanggal 12 Desember 2019 sampai tanggal 10 Januari 2020.

Tanggal: 12 Desember 2019-11 Januari 2020.

Hari : Senin-Jumat.

#### **Sumber Data**

Bersumber dari data penelitian, maka peneliti mengklasifikasi

menjadi dua sumber data, yakni data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer, yaitu data yang khusus untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. Data tersebut dirangkum sendiri oleh peneliti langsung dan bersumber dari pihak pertama atau dari tempat objek penelitian yang dilakukan.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang sudah terkumpul dengan maksud selain dari menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. Di dalam riset ini sumber data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka seperti artikel, literatur dan jurnal serta situs di internet yang masih relevan dengan riset yang dilakukan.

### **Metode Penentuan Informan**

Menurut pendapat Sugiyono (2012:208) dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposive random sampling. Peneliti menggunakan teknik purposive random sampling yang dilakukan dengan pertimbangan-perimbangan tertentu.

### **Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan model wawancara. Ini dilakukan agar mendapatkan informasinya dengan komunikasi langsung kepada informan yang ingin diteliti. Wawancara tersebut melalui proses interaksi dan komunikasi. Teknik wawancara ini yang digunakan adalah melalui wawancara secara terbuka (tidak

terstruktur). Wawancara informan terbuka dan dapat secara bebas menyampaikan pendapatnya tentang suatu gejala sosial tertentu. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai persepsi, pendapat, kepercayaan, dan sikap dari para informan yang ada.

#### **b. Observasi**

Nawawi dan Martini (1992:74) berpendapat bahwa, "Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian". Observasi juga kegiatan yang merupakan proses pencatatan dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menyempurnakan proses penelitian agar mencapai hasil yang maksimal. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan melibatkan diri secara langsung dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh informan.

#### **c. Dokumentasi**

Hamidi (2004:72) mengatakan, metode dokumentasi merupakan informasi dari catatan-catatan penting baik dari lembaga atau dari perorangan. Dokumentasi ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang.

### **Metode Analisis Data**

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif yang terdiri dari 4 komponen, yaitu :

1. pengumpulan data,
2. reduksi data,
3. penyajian data dan

#### 4. penarikan kesimpulan.

##### **Keabsahan Data**

Pengujian keabsahan data penelitian hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Trianggulasi merupakan cara yang paling umum digunakan dalam jaminan validitas data penelitian kualitatif.

##### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Program Program Pelayanan Sosial Fakir Miskin**

Kemiskinan di Kabupaten Jember merupakan suatu permasalahan yang sangat penting untuk diatasi, Pemerintah Jember sebagai pemilik tanggung jawab di Kabupaten Jember telah melakukan berbagai usaha dalam mengatasi kemiskinan yang ada di daerahnya dengan membuat berbagai kebijakan sebagai upaya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Dinas Sosial merupakan salah satu bagian dari lembaga pemerintah Kabupaten Jember yang memiliki fokus dalam pembangunan kesejahteraan sosial hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2009 yaitu tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa "Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,

dan pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial. Pada pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan dinas sosial terdapat beberapa fokus salah satunya yaitu mengatasi kemiskinan, dalam mengatasi kemiskinan dinas sosial berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan berpedoman pada Rencana Induk Kesejahteraan Sosial Daerah (RIKSD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dinas sosial dalam melaksanakan berbagai program untuk mengatasi kemiskinan melalui sebuah seksi yang terdapat dalam bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lansia, Fakir Miskin, dan Korban Bencana yaitu pada seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial fakir miskin, dimana pada seksi tersebut menjalankan sebuah kebijakan yaitu pelayanan sosial terhadap fakir miskin dimana terdapat beberapa program yang dijalankan. Menurut wawancara peneliti dengan seorang informan yaitu Bapak Agus Pujiharto, S.Sos selaku kepala bidang penyandang masalah kesejahteraan sosial lansia, fakir miskin dan korban bencana memberikan keterangan sebagai berikut :

"Dalam pelayanan sosial fakir miskin ini ada dua program yang akan di berikan kepada stakeholder atau dalam hal ini masyarakat miskin, yaitu

program fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin dan yang kedua program pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin.” (wawancara 19 Desember 2019).

Dari keterangan atau informasi yang sudah di jelaskan oleh informan sebelumnya sudah cukup jelas, akan tetapi ada tambahan informasi tentang penjelasan mengenai bentuk kegiatan program dari Bapak Hariyono yaitu selaku staf seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial fakir miskin sebagai berikut :

“Jadi untuk bentuk dari program fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin ada dua kegiatan pertama bimtek dan rakor pkh yang kedua pengadaan seragam pkh untuk sasarannya operator dan pendamping pkh, sementara untuk program kedua yaitu program pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi usaha keluarga miskin dalam bentuknya ada beberapa kegiatan seperti pendistribusian bantuan sembako, pemberian bantuan bahan pokok bagi fakir miskin dengan sasaran fakir miskin” (wawancara, 19 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dalam kebijakan pelayanan sosial fakir miskin ini terdapat dua program yaitu Program fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Program pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi usaha keluarga miskin dengan pemberian bantuan pokok bagi fakir miskin. Kedua program tersebut merupakan beberapa program andalan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Jember melalui seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial fakir miskin dalam rangka untuk

mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya program-program ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif yakni membantu fakir miskin dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Pada pelaksanaan implementasi pelayanan sosial fakir miskin di dinas sosial Kabupaten Jember ini terdapat beberapa komponen yang terlibat, dimana selain Dinas Sosial Kabupaten Jember, terdapat komponen lain yang terlibat yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dalam hal ini merupakan seseorang yang diberi tugas dan fungsi maupun kewenangan oleh Kementrian Sosial, Dinas atau Instansi Provinsi, Dinas atau Instansi Kabupaten dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasannya di Kecamatan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di ketahui bahwa Tenaga Kesejahteraan sosial Kecamatan (TKSK) memiliki tugas untuk membantu Dinas Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang salah satunya adalah pelayanan sosial fakir miskin.

Analisis Implementasi Pelayanan Sosial Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember jika dikaitkan dengan teori *George Edward III* ada 4 variabel yang menentukan Implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, dalam sub-subab berikut peneliti mengkajinya satu persatu sebagai berikut:

### **Komunikasi**

Komunikasi memiliki peran yang sangat menentukan dalam keberhasilan pencapaian tujuan dalam implementasi kebijakan. Kesuksesan sebuah kebijakan dapat

dilihat dari segi komunikasi. Kebijakan tersebut harus disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Oleh karena itu diperlukannya tiga hal, yaitu penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula, adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaannya, dan juga adanya konsistensi yang diberikan pelaksanaan dalam kebijakan. Dalam hal ini peneliti membahas fenomena komunikasi dengan memperhatikan hal yaitu, transmisi dan kejelasan serta konsistensi yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

a. Transmisi (Penyaluran)

Transmisi merupakan faktor utama dalam aktor hal komunikasi pelaksana kebijakan. Transmisi dalam implementasi pelayanan sosial fakir miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember yaitu berupa Koordinasi antara dinas sosial dengan koordinator lapangan yaitu Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan masyarakat dalam pelaksanaan program pelayanan sosial fakir miskin disampaikan secara langsung. Berikut wawancara dengan kepala bidang penyandang masalah kesejahteraan sosial lansia, fakir miskin, dan korban bencana:

“komunikasi yang kami (dinas sosial) berikan kepada koordinator lapangan dan masyarakat dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial fakir miskin secara langsung yaitu melalui proses sosialisasi.” (wawancara 24 Desember 2019 dengan Kepala Bidang PMKS lansia, fakir miskin, dan korban bencana, Bpk Agus Pujiharto, S.Sos).

b. Kejelasan

Kejelasan Komunikasi dalam implementasi pelayanan sosial fakir miskin, yang merupakan penyampaian informasi dari dinas sosial kepada koordinator lapangan dan masyarakat dilakukan melalui sosialisasi secara langsung, hal tersebut dinilai sudah benar dan efisien, sehingga para pelaksana maupun penerima mendapatkan informasi dengan jelas termasuk juga tentang informasi terbaru tentang pelayanan sosial fakir miskin.

c. Konsistensi

Faktor Ketiga yaitu konsistensi dimana perintah yang diberikan dalam pelaksanaan program harus memiliki konsistensi dan jelas, tidak sebaliknya. Berdasarkan data hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari salah satu anggota Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan bahwa dalam penyampaian informasi berkaitan dengan pelayanan sosial fakir miskin sudah baik tidak ada tumpang tindih antara satu sama lain, semua informasi yang diberikan sesuai dan sama dengan penjelasan yang diberikan oleh pemberi informasi, dengan kata lain dalam penyampaian informasi yang dilakukan oleh dinas sosial sudah konsisten.

**Sumber Daya**

sumberdaya mempunyai peranan yang penting dalam implementasi kebijakan. Pada sumberdaya terdapat beberapa faktor yang meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya fasilitas.

a. Sumber Daya Staf atau Manusia

Staf atau manusia merupakan sumber daya utama yang harus ada pada suatu implementasi. Karena sebuah implementasi tentu tidak berhasil jika tidak ada dukungan dari

staf yang berkualitas. Oleh karena itu, implementasi pelayanan dan rehabilitasi sosial fakir miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember ini sangat dibutuhkan sumber daya yang cakap di masing-masing bidangnya. Sumber daya (staf) yang diuraikan dalam implementasi pelayanan sosial fakir miskin ialah Kepala Dinas, Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lansia, Fakir Miskin, dan Korban Bencana, Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Fakir Miskin, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

**b. Sumber Daya Fasilitas**

Sumber daya fasilitas merupakan salah satu faktor yang tidak kalah penting dengan sumber daya lainnya dalam implementasi pelayanan sosial fakir miskin. Sumber daya fasilitas merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak seperti gedung, transportasi, dan peralatan pembantu akan sangat menunjang implementasi suatu kebijakan. sumber daya fasilitas yang dimiliki dinas sosial dalam mendukung agar terlaksananya implementasi pelayanan sosial fakir miskin yaitu seperti gedung, kendaraan, serta komputer. Fasilitas yang dimaksud tersebut sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini.

**c. Sumber Daya Anggaran**

merupakan suatu perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun secara terpadu dan jelas dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Pada sumber daya anggaran pelayanan sosial fakir miskin ini peneliti sudah berusaha untuk mencari maupun meminta data secara langsung kepada pihak dinas terkait mengenai data anggaran

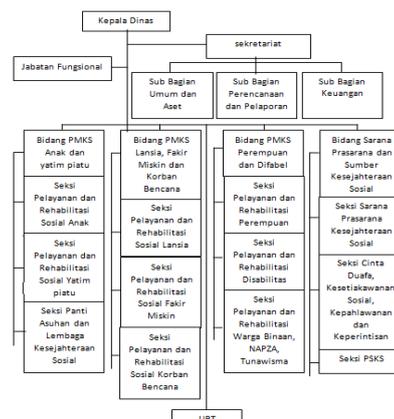
dalam pelaksanaan implementasi tersebut. Namun peneliti tidak mendapatkan data tersebut, dugaan peneliti data tersebut dirahasiakan sehingga tidak dapat di publikasi.

**Struktur Birokrasi**

Struktur Birokrasi termasuk salah satu faktor penting dalam implementasi pelayanan sosial fakir miskin. Pada struktur birokrasi sendiri terdapat dua karakteristik, yaitu, Fragmentasi dan prosedur kerja ukuran dasar atau sering disebut Standar Operating Procedure (SOP).

**a. Fragmentasi**

merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin, besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Struktur organisasi pada dinas sosial Kabupaten Jember menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain. Pada struktur organisasi ini pola koordinasi yang terjalin menempatkan kepala dinas sebagai pejabat tertinggi dimana setiap bagian-bagian terhubung dengan rantai komando langsung ke kepala dinas. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember :



Berdasarkan gambar bagan struktur tersebut, Pada dinas sosial terdapat 4 bidang yakni Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak dan Yatim Piatu, Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lansia, Fakir Miskin, dan Korban Bencana, Bidang PMKS Perempuan dan Difabel, serta Bidang Sarana prasarana dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial. Untuk kebijakan pelayanan sosial fakir miskin ini dipegang oleh Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lansia, Fakir Miskin, dan Korban Bencana.

b. (SOP) Standart Operating Procedure

SOP yang benar adalah yang mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerja implementor. Harapan dengan adanya SOP, sumber daya pengampu kebijakan mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam SOP sehingga menimbulkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Menurut wawancara dengan kepala seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial fakir miskin yaitu Bapak Didik, S.Sos:

“Jadi ya dek Pada pelaksanaan pelayanan sosial fakir miskin ini kami dari dinas sosial kabupaten jember belum memiliki prosedur kerja jadi untuk kami menggunakan undang-undang nomer 13 tahun 2011 sebagai

petunjuk pelaksanaan, begitu dek”.(Wawancara,27 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam implementasi pelayanan dan rehabilitasi sosial ini belum memiliki SOP atau prosedur kerja, sehingga dalam hal ini Dinas Sosial masih menggunakan sebuah konsep yaitu petunjuk makro dalam implementasi ini yaitu undang-undang nomer 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Dengan belum adanya SOP yang jelas mengakibatkan kurang optimalnya pelaksana dalam bekerja.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dinas Sosial dalam implementasi pelayanan dan rehabilitasi sosial fakir miskin ini belum mempunyai SOP, sedangkan struktur birokrasi sangat baik yaitu yang telah tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember.

**Disposisi**

Disposisi menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Pada disposisi terdapat dua faktor penting, yaitu seleksi personil dan insentif.

a. Seleksi Personil

seleksi personil merupakan salah satu faktor utama, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh

pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus pada kepentingan warga. Pengangkatan atau seleksi personil untuk jabatan di Dinas Sosial Kabupaten Jember merupakan wewenang Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

b. Insentif

Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan bisa menjadi faktor pendorong yang membuat yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik.

**Kesimpulan**

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam Implementasi Pelayanan Sosial Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember sudah berjalan cukup baik dengan adanya beberapa program sebagai pendukung dalam pelaksanaannya seperti program fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin dan program sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin. Kemudian, berdasarkan uraian pada pembahasan yang di dapat sesuai dari hasil penelitian mengenai Implementasi Pelayanan Sosial Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember

**Saran**

- a. Perlu adanya pendataan terbaru mengenai data fakir miskin di

Kabupaten Jember untuk tiap tahunnya, agar pemerintah lebih mudah dalam mengambil kebijakan dan bisa mengevaluasi apakah sudah tepat sasaran atau tidak.

- b. Perlu agar lebih memanfaatkan sarana informasi yang ada untuk mengakses dan memberikan data informasi yang transparansi agar bisa diperoleh dan diketahui oleh pemerintah itu sendiri dan masyarakat.
- c. Perlu segera diterbitkan SOP sebagai inti di dalam suatu lembaga ataupun instansi pemerintahan agar nantinya dapat dijadikan sebagai suatu pedoman dalam setiap adanya pelaksanaan kebijakan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ilfan Baharudin, 2018. *Jurnal Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial di Kelurahan Gubuksuma Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan.*

Andi Fitrah P. Putra, Juanda Nawawi, Rahmatullah, 2016. *Jurnal Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Pengentasan Kemiskinan pada Program UEP dan KUBE.*

Ndunn, William 2002. *Analisis Kebijakan Publik* edisi ke-2.

Haerah Kahar Drs. M.Si, 2016. *Metodologi Penelitian Sosial.* Fisipol Universitas Muhammadiyah Jember.

M.Afrinaldi, 2017. *Jurnal Efektivitas Program Penanganan Fakir*

*Miskin di Kabupaten Kampar Studi Kasus Bantuan Peningkatan Ketrampilan di Kelurahan Sungai Pagar.*

J.Moeleong, Lexy, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Revly Sian Lizard, Marthen Kimbal, Marlien Lopian, 2017. *Jurnal Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado.*

Muhammad Hasanurrizqi, Annisa Rahmadanita, 2018. *Jurnal*

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.

Adi, Isbandir Rukminto, 2005. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Jakarta : UI Press.

Ismawan, Bambang, 2000. *Pemberdayaan Orang Miskin, Refleksi Seorang Pegiat LSM*. Jakarta : Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.

Peraturan daerah kabupaten jember nomor 8 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

*Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Program Kube oleh Dinas Sosial di Kecamatan Tanahgrogot Kabupaten Panser Provinsi Kalimantan Timur.*

Hardiansyah, 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.

Lembaga Administrasi, 2004. *System Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI); Dalam landasan dan pedoman pokok penyelenggaraan dan pengembangan system administrasi negara.*